

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya (Miriam Budiardjo, 1982:1).

Menurut UNDP mengemukakan partisipasi yaitu setiap orang atau setiap warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.

Menurut Herbert McClosky dalam *International Encyclopedia of the Social Science*, Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat dimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (Miriam Budiardjo, 1982:1).

Partisipasi politik menurut Norman H. Nie dan Sidney Verba dalam *Handbook of Political Science* adalah :

Kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan/atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. Yang diteropong terutama adalah tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah. Sekalipun fokus sebenarnya lebih luas tetapi abstrak, yaitu otoratif untuk masyarakat (Miriam Budiardjo, 1982:1-27).

Kegiatan politik dalam partisipasi mempunyai macam-macam bentuk dan intensitas biasanya diadakan pembedaan partisipasi berdasarkan jenis frekuensi dan intensitasnya. Tingkatan partisipasi dalam piramida partisipasi yang disusun oleh David F. Root dan Frank L. Wilson yang dikutip Miriam Budiardjo, (1982:6).

1. Aktivist adalah pejabat partai sepenuh waktu pemimpin partai atau kelompok kepentingan.
2. Partisipan adalah petugas kampanye, anggota aktif dari partai/kelompok kepentingan aktif dalam proyek-proyek sosial.
3. Pengamat adalah yang menghadiri rapat umum, anggota partai atau kelompok kepentingan, membicarakan masalah politik, mengikuti perkembangan politik melalui media massa, memberikan suara dalam pemilihan umum.
4. Orang yang apolitis adalah yang tidak ikut pemilihan, bersikap acuh tak acuh dan tidak tertarik oleh, atau kurang paham mengenai masalah politik.

Bentuk partisipasi politik yang paling mudah untuk diukur intensitasnya adalah perilaku warga dalam memberikan suaranya dalam suatu pemilihan umum, yaitu dengan cara membandingkan jumlah persentase warga yang memilih dengan warga yang berhak memilih.

Sedangkan menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam *No easy Choice*”

”Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau

spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif (Miriam Budiardjo, 1982:1-27)".

Partisipasi politik merupakan ciri khas modernisasi politik. Partisipasi dan saluran-saluran partisipasi yang lebih khusus yang menggerakkan individu-individu dan golongan-golongan dapat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi dan politik. Dalam jangka panjang, modernisasi sosial dan ekonomi menghasilkan partisipasi politik yang lebih luas. Akan tetapi proses-proses tidak mantap, tidak seragam dapat diubah lagi.

Partisipasi politik dapat berbentuk konvensional (voting, diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan tergabung dalam kelompok kepentingan, komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif) maupun non-konvensional (demonstrasi, konfrontasi, mogok, tindak kekerasan politik terhadap harta benda, tindakan kekerasan politik terhadap manusia perang gerilya dan revolusi) (Gabriel Almond, 2001:33).

Sementara itu menurut Goldsmith dan Blustein dalam Ndraha (1990:105) menjelaskan bahwa masyarakat tergerak untuk berpartisipasi jika :

1. Partisipasi itu dikenal melalui organisasi yang sudah dikenal atau sudah ada di tengah-tengah masyarakat.
2. Partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan.
3. Manfaat yang diperoleh dari partisipasi itu memenuhi kepentingan masyarakat setempat.
4. Dalam proses partisipasi itu terjamin adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. Partisipasi dikatakan berkurang jika mereka tidak atau kurang berperan dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian partisipasi politik adalah suatu keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang ditujukan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan memberikan masukan ide yang bertujuan memecahkan permasalahan serta mencari jalan keluar untuk memajukan pembangunan masyarakat secara bersama-sama.

B. Tinjauan Tentang Perilaku Politik

Surbakti (1992:131), perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, yang melakukan kegiatan adalah pemerintah dan masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu fungsi-fungsi pemerintahan yang dipegang oleh pemerintah dan fungsi-fungsi politik yang dipegang oleh masyarakat.

Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Rahman (1998:123), yang mengatakan bahwa perilaku politik sering dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Adapun yang melakukan kegiatan politik adalah pemerintah dan masyarakat sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Menurut Surbakti (1992:132), dalam melakukan kajian terhadap perilaku politik dapat dipilih tiga kemungkinan unit analisis, yakni individu, aktor politik, agregasi politik dan tipologi kepribadian politik. Adapun dalam kategori individu aktor individu aktor politik meliputi aktor politik (pemimpin), aktivitas politik dan individu warga negara biasa. Agregasi politik adalah individu aktor politik secara kolektif, seperti kelompok kepentingan, birokrasi, partai politik, lembaga-lembaga pemerintahan dan bangsa. Sedangkan yang dipelajari dalam tipologi kepribadian politik adalah tipe-tipe kepribadian pemimpin otoriter, *Machiavelist* dan demokrat.

Secara garis besar pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku politik adalah kegiatan yang selalu berkaitan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan fungsinya masing-masing, yakni pemerintah menjalankan fungsi pemerintahan dan masyarakat menjalankan fungsi-fungsi politiknya.

C. Tinjauan Tentang Perilaku Memilih

Kristiadi (1996:76) berpendapat bahwa, perilaku pemilih adalah keterikatan seseorang untuk memberikan suara dalam proses pemilihan umum berdasarkan faktor psikologis, faktor sosiologis dan faktor rasional pemilih atau disebut teori *voting behavioral*. Mahendra (2005:75) mengatakan, perilaku pemilih adalah tindakan seseorang ikut serta dalam memilih orang, partai politik atau isu publik tertentu.

Ada beberapa pendekatan untuk melihat perilaku pemilih menurut Surbakti (1992:145) :

1. Pendekatan Struktural

Pendekatan struktural melihat kegiatan memilih sebagai produk dari konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, struktur partai, sistem pemilihan umum, permasalahan dan program yang ditonjolkan oleh setiap partai. Struktur sosial yang menjadi sumber kemajemukan politik dapat berupa kelas sosial atau perbedaan-perbedaan antara majikan dan pekerja, agama, perbedaan kota dan desa, serta bahasa dan nasionalisme.

2. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Kongkretnya, pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal (kota-desa), pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan dan agama.

3. Pendekatan Ekologis

Pendekatan ekologis hanya relevan apabila dalam suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit teritorial, seperti desa, kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Jika di Amerika Serikat terdapat *distric, precinct dan ward*. Kelompok masyarakat seperti tipe penganut agama tertentu, buruh, kelas menengah, mahasiswa, suku tertentu, sub kultur tertentu dan profesi tertentu bertempat tinggal pada unit teritorial. Sehingga perubahan komposisi penduduk yang tinggal di unit teritorial dapat dijadikan sebagai penjelasan atas perubahan hasil pemilihan umum.

4. Pendekatan Psikologi Sosial

Pendekatan psikologi sosial sama dengan penjelasan yang diberikan dalam model perilaku politik. Salah satu konsep psikologi sosial yang digunakan untuk menjelaskan perilaku untuk memilih pada pemilihan umum berupa identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai tertentu. Kongkretnya, partai yang secara emosional dirasakan sangat dekat dengannya merupakan partai yang selalu dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor lain.

5. Pendekatan Pilihan Rasional

Pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi, yang dipertimbangkan tidak hanya "ongkos" memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah. Bagi pemilih pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih.

Sedangkan menurut Heywood (1997:224), melihat perilaku pemilih dari beberapa model, yaitu :

1. Model Identifikasi Partai

Teori paling awal dari perilaku memilih adalah model identifikasi partai yang merupakan bagian dalam faktor psikologis, ini didasarkan pada pengaruh psikologis dari orang-orang yang menjadi anggota partai. Pemilih melihat orang yang dipilih dengan mengidentifikasi dari partai yang diikuti, hal ini termasuk dukungan dalam jangka panjang untuk menghormati partai sebagai partai mereka sendiri. Pemungutan suara merupakan suatu penjelmaan sikap berat sebelah, bukan produk kalkulasi yang dipengaruhi oleh faktor seperti kebijakan, kepribadian, berkampanye dan pemberitaan media.

Model ini mengakibatkan tekanan berat pada sosialisasi politik tingkat awal, karena melihat keluarga sebagai prinsip dasar dimana loyalitas politik dibina. Hal ini dibanyak kasus diperkuat oleh kelompok masyarakat dan pengalaman sosial dimasa lalu. Pada model ini sikap diarahkan kepada tokoh pemimpin dan kebijakan, seperti halnya persepsi tentang kelompok kepentingan individu, ditujukan untuk menciptakan stabilitas dan kontinuitas terutama dari pola kebiasaan perilaku memilih dan terkadang berlaku seumur hidup. Dari sudut pandang ini sangatlah mungkin untuk memberikan suara yang wajar pada partai berdasarkan pada tingkat kefanatikan.

2. Model Sosiologis

Hubungan antara model sosiologis dengan perilaku memilih terhadap minat pada suatu grup didukung oleh tujuan pemilih untuk mengadopsi pola memilih yang merefleksikan posisi ekonomi dan sosial pada grup dimana mereka tergabung. Lebih dari itu pengembangan faktor psikologis yang mempengaruhi partai yang berasal dari pengaruh keluarga. Sorotan utama dari model ini adalah kepentingan dari perjanjian sosial, mencerminkan tekanan di dalam kemasyarakatan. Yang paling penting untuk bagian ini adalah kelas, *gender*, *etnisitas*, agama dan wilayah.

3. Model Pilihan Rasional

Model pilihan rasional lebih memperhatikan pendapat individu dan jauh dari sosialisasi dan perilaku kelompok sosial. Disini pemungutan suara dilihat sebagai sikap yang rasional, pemilih individu percaya untuk memilih partai dan mereka lebih memilih kepada seseorang yang diminati. Telah menjadi suatu kebiasaan ada suatu manifestasi pengaruh dan kesetiaan didalam pemungutan suara yang dianggap sebagai alat yang penting. Model pilihan rasional berbeda dalam beberapa hal seperti yang ditulis oleh V.O. Key (1966), melihat pemilih sebagai pola pikir masa lalu dalam kekuasaan partai dan bagaimana penampilannya mempengaruhi pilihan masyarakat. Selanjutnya yang paling penting adalah isu pemungutan suara dan pendapat beberapa partai dapat berpengaruh pada pilihan mereka yang dibentuk ulang oleh politik.

4. Model Ideologi Dominan

Radikal teori dalam pemilihan suara menuju kepada fokus utama dari tingkat pilihan individu yang dibentuk oleh proses dari manipulasi ideologi dan kontrol. Di beberapa anggapan seperti beberapa perubahan teori dalam model sosiologi, pemungutan suara disebut sebagai kedudukan seseorang dalam hierarki sosial dimana teori ini berbeda dengan model sosiologi, meskipun begitu bagaimana individu menginterpretasikan posisi mereka bergantung pada bagaimana mereka dilihat dari segi pendidikan oleh pemerintah dan lebih dari itu oleh media massa.

Masih berkaitan dengan perilaku pemilih, menurut Afan Gaffar yang dikutip oleh Asfar (2005:47) menyatakan bahwa selama ini penjelasan-penjelasan teoritis tentang *voting behavior* didasarkan pada tiga model pendekatan, yaitu model pendekatan sosiologis, model pendekatan psikologis dan model pendekatan politik rasional.

- a. Pendekatan sosiologis, pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku pemilih. Pengelompokan sosial seperti umur (tua-muda), jenis kelamin (laki-perempuan), agama dan semacamnya dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk perilaku pemilih.

Untuk itu, pemahaman terhadap pengelompokan sosial baik secara formal seperti keanggotaan seseorang dalam organisasi-organisasi keagamaan, organisasi-organisasi profesi, kelompok-kelompok okupasi dan sebagainya, maupun pengelompokan-pengelompokan informal seperti keluarga, pertemanan ataupun kelompok-kelompok kecil lainnya merupakan sesuatu yang sangat vital dalam memahami perilaku politik, karena kelompok-kelompok ini mempunyai peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi dan orientasi seseorang.

- b. Pendekatan psikologis. Pendekatan ini menggunakan dan mengembangkan konsep psikologi terutama konsep sikap dan sosialisasi, untuk menjelaskan perilaku pemilih. Menurut pendekatan ini pemilih menentukan pilihannya karena pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sebagai produk dari proses sosialisasi. Melalui proses sosialisasi kemudian berkembang ikatan psikologis yang kuat antara seseorang dengan organisasi kemasyarakatan atau partai politik. Almond dalam Suryanef (2000) menyatakan bahwa sosialisasi politik menunjuk pada proses pembentukan sikap-sikap dan pola tingkah laku politik serta merupakan sarana bagi generasi untuk mewariskan patokan-patokan dan keyakinan politik kepada generasi sesudahnya.
- c. Pendekatan politis rasional. Pada pendekatan ini isu-isu politik menjadi pertimbangan penting. Para pemilih akan menentukan pilihan berdasarkan penilaiannya terhadap isu-isu politik dan kandidat yang diajukan. Artinya para pemilih dapat menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional.

Beberapa pendekatan ini dapat menjelaskan bagaimana perilaku memilih masyarakat dalam partisipasi politiknya pada pemilihan umum anggota legislatif tahun 2009. Karena pendekatan-pendekatan tersebut sama-sama berasumsi bahwa memilih merupakan kegiatan yang otonom, dalam arti tanpa desakan dan paksaan dari pihak lain. Namun, dalam kenyataan di negara-negara berkembang perilaku memilih bukan hanya ditentukan oleh pemilih sebagaimana disebutkan oleh beberapa pendekatan diatas, tetapi dalam banyak hal justru ditentukan oleh tekanan kelompok intimidasi dan paksaan dari kelompok atau pemimpin tertentu.

Penelitian ini memfokuskan pada tiga model menurut Heywood (1997:224) yaitu faktor sosiologis, faktor pilihan rasional dan faktor psikologis ini dikarenakan ketiga pendekatan atau model ini telah dapat mewakili dan cukup relevan untuk menjelaskan bagaimana perilaku memilih masyarakat Kota Metro dalam mendukung Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu legislatif 2009. Beberapa indikator dari ketiga pendekatan ini, yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan pilihan rasional dan pendekatan psikologis dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pendekatan Sosiologis

1) Peran keluarga

Pilihan politik pemilih dalam memberikan dukungannya kepada partai politik atau kandidat dalam pemilu tidak banyak dipengaruhi motivasi ideologis tertentu dan lebih didorong oleh konteks dinamika lingkungan politik lokal, pemilih mudah dipengaruhi kepentingan-kepentingan tertentu terutama oleh orang terdekat seperti anggota keluarga, mulai dari orang tua hingga kerabat.

2) Peran teman sepermainan

Keberadaan teman sangat berpengaruh dalam diri seseorang, terutama bagi mereka yang pola pikirnya belum dewasa. Apa yang akan kita pakai, apa yang akan kita katakan dan apa yang akan kita lakukan seringkali berdasarkan referensi dari teman-teman kita.

Terutama juga dalam pemilu legislatif 2009, adanya komunikasi dan masukan-masukan dari teman dapat mempengaruhi pola pilih pemilih dalam menentukan pilihannya.

b. Pendekatan Pilihan Rasional

- 1) Orientasi kandidat dan program partai
Kandidat secara faktual adalah bagian penting dari proses pelaksanaan pemilu. Seperti digambarkan diatas, kualitas, kapasitas, integritas dan akuntabilitas kandidat yang tampil dalam pemilu legislatif akan sangat mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan. Selain itu, secara rasional masyarakat juga menginginkan calon yang memiliki program-program yang ditawarkan demi kesejahteraan rakyat dan bukan sekedar janji-janji belaka. Hal ini akan dapat menentukan perilaku pemilih secara rasional.
- 2) Peran media
Peran media sangat berpengaruh bagi pemilih untuk menentukan pilihannya. Program-program yang ditawarkan baik melalui media televisi ataupun koran dapat dengan mudah diakses oleh pemilih. Dengan adanya iklan-iklan partai yang terus menerus dapat mempengaruhi serta memberikan gambaran bagi pemilih siapakah calon yang layak mereka pilih.

c. Pendekatan Psikologis

- 1) Identifikasi partai
Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau keterikatan psikologis pemilih terhadap partai tertentu. Kongkretnya, partai yang secara emosional dirasakan sangat dekat dengannya merupakan partai yang selalu dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor lain. Selain itu masih adanya keterikatan pemilih terhadap keluarga terutama orang tua, dalam hal ini partai yang selalu dijunjung oleh keluarga maka akan dia junjung pula. Artinya pemilih melihat orang yang dipilih dengan mengidentifikasi dari partai yang diikuti oleh orang tuanya.
- 2) Ketokohan
Faktor psikologis lainnya yang dapat dipertimbangkan adalah ketokohan, yaitu seseorang memilih tidak melihat partai atau kandidat, tetapi melihat tokoh atau pemimpin yang bernaung di atasnya.

D. Tinjauan Tentang Partai Politik

1. Definisi Partai Politik

Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka (Miriam Budiardjo, 1972:160-161).

Menurut Carl J. Friedrich partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partai-partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil (Miriam Budiardjo, 1972:161).

Partai politik menurut R. H. Soltau adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka (Miriam Budiardjo, 1972:161).

Sedangkan Partai politik menurut Sigmund Neumann dalam karangannya

Modern Political parties mengemukakan definisi sebagai berikut :

Partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas

dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda (Miriam Budiardjo, 1972:161).

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian partai politik adalah sekumpulan orang atau individu yang terorganisir, memiliki orientasi untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan, mereka memiliki program kerja dan ideologi serta memerlukan dukungan publik.

2. Fungsi Partai Politik

Dalam negara demokratis agar partai politik dapat mengendalikan atau mengawasi pemerintahan dengan baik, maka partai politik menjalankan beberapa fungsinya menurut Sukarna (1981:90). Partai Politik menjalankan beberapa fungsi yaitu :

1. Pendidikan politik
2. Doktrin-doktrin politik
3. Pemilihan pemimpin-pemimpin politik
4. Pemandu pemikiran-pemikiran politik
5. Memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat
6. Melakukan tata hubungan politik
7. Mengeritk rezim yang memerintah
8. Membina opini masyarakat
9. Mengusulkan Calon
10. Memilih pejabat-pejabat yang diangkat
11. Bertanggungjawab atas pemerintahan
12. Menyelesaikan perselisihan
13. Mempersatukan pemerintahan.

Sedangkan menurut Umarudin Masdar (1999:107) partai politik memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Sosialisasi politik
2. Rekrutmen politik
3. Partisipasi politik
4. Pemandu kepentingan

5. Komunikasi politik
6. Pengendalian konflik

Selain itu, Haryanto (1982:89), mengemukakan bahwa fungsi-fungsi partai politik, yaitu :

1. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik
2. Partai politik sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan.
3. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik
4. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik
5. Partai politik sebagai sarana pembuatan kebijaksanaan
6. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik

Adapun fungsi parpol menurut UU No. 2 Tahun 2008 dalam pasal 11 mengemukakan bahwa, partai politik berfungsi sebagai sarana :

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
- c. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia.
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi partai politik meliputi :

1. Pendidikan Politik

Pendidikan politik diberikan bagi kader partai yang meliputi dasar, tujuan program partai yang bersangkutan, disamping ilmu lain yang menunjang terhadap kekuatan partai. Pendidikan politik biasanya dilakukan secara intensif pada partai kader, tetapi tidak demikian halnya pada partai massa. Oleh sebab itu terkadang partai massa cenderung

terkendalikan oleh partai kader, mengingat orang-orang dalam partai kader benar-benar terdidik dalam organisasi politik dan berprinsip.

2. Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat, dimana individu-individu dapat memperoleh pengetahuan, nilai-nilai dan sikap-sikap terhadap sistem politik masyarakatnya. Proses ini berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal, non-formal dan informal maupun secara tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga dan tetangga maupun dalam kehidupan masyarakat.

Dari segi metode penyampaian pesan, sosialisasi politik dibagi menjadi dua, yakni : Pertama, pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Kedua, dengan indoktrinasi politik, yaitu proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma dan simbol yang dianggap pihak yang berkuasa sebagai ideal dan baik.

3. Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. Fungsi ini sangat penting bagi keberlangsungan sistem

politik, sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam.

Boleh jadi perekrutan politik berhubungan dengan karier seseorang di bidang politik dan juga menjamin eksistensi partai. Adapun cara yang ditempuh dalam melaksanakan perekrutan politik antara lain dapat ditempuh melalui kontak-kontak pribadi, persuasi dan juga dapat dilakukan dengan menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang diharapkan di masa yang akan datang untuk menduduki jabatan politik/pemerintahan.

4. Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Dalam hal ini, partai politik mempunyai fungsi untuk membuka kesempatan, mendorong dan mengajak para anggota partai dan anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan yang mampu mempengaruhi proses politik.

5. Pemandu Kepentingan

Fungsi pemandu kepentingan yaitu untuk menampung dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan, maka partai politik dibentuk. Kegiatan menampung, menganalisis dan memadukan berbagai kepentingan yang berebeda bahkan bertentangan menjadi

berbagai alternatif kebijakan umum, kemudian diperjuangkan dalam proses pembuatan dan keputusan politik.

6. Komunikasi Politik

Komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Dalam hal ini, partai politik berfungsi sebagai komunikator politik yang tidak hanya menyampaikan segala keputusan dan penjelasan pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga menyampaikan aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat kepada pemerintah.

Selain komunikasi politik menghubungkan antara pemerintah dengan rakyat, dapat pula menentukan kualitas tanggapan dari pemerintah atau masyarakat itu sendiri. Bilamana komunikasi itu berjalan dengan lancar, wajar dan sehat, maka akan meningkatkan kualitas respon yang tinggi terhadap perkembangan aspirasi dan kepentingan masyarakat serta tuntutan perubahan zaman.

3. Klasifikasi Partai

Menurut Miriam Budiardjo (1972:166-167) menyatakan bahwa klasifikasi partai dapat dilakukan dengan berbagai cara. Bila dilihat dari segi komposisi dan fungsi keanggotaannya, secara umum dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu :

1. Partai Massa

Partai Massa mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota, oleh karena itu ia biasanya terdiri dari pendukung-pendukung dari berbagai aliran politik dalam masyarakat yang sepakat untuk

bernaung dibawahnya dalam memperjuangkan suatu program yang biasanya luas dan agak kabur. Kelemahan dari partai massa ialah bahwa masing-masing aliran atau kelompok yang bernaung di bawah partai massa cenderung untuk memaksakan kepentingan masing-masing, terutama pada saat-saat krisis, sehingga persatuan dalam partai dapat menjadi lemah atau hilang sama sekali sehingga salah satu golongan memisahkan diri dan mendirikan partai baru.

2. Partai Kader

Partai Kader mementingkan keketatan organisasi dan disiplin kerja dari anggota-anggotanya. Pimpinan partai biasanya menjaga kemurnian doktrin politik yang dianut dengan jalan mengadakan saringan terhadap calon anggotanya dan memecat anggota yang menyeleweng dari garis partai yang telah ditetapkan.

Klasifikasi lainnya dapat dilakukan dari segi sifat dan orientasi menurut Miriam

Budiardjo (1972:166-167) dibagi menjadi dua jenis, yakni :

1. Partai Lindungan (*patronage party*)

Partai lindungan umumnya memiliki organisasi nasional yang kendor (sekalipun organisasinya di tingkat local sering cukup ketat), disiplin yang lemah dan biasanya tidak terlalu mementingkan pemungutan iuran secara teratur. Maksud utama ialah memenangkan pemilihan umum untuk anggota-anggota yang dicalonkannya, karena itu hanya giat menjelang masa-masa pemilihan. Partai Demokrat dan Partai Republik di Amerika Serikat merupakan contoh dari partai semacam ini.

2. Partai Ideologi atau Partai Azas (*weltanschauungs partei* atau *programmatic party*)

Partai ideologi atau partai azas (sosialisme, fasisme, komunisme, Kristen-demokrat) biasanya mempunyai pandangan hidup yang digariskan dalam kebijaksanaan pimpinan dan berpedoman pada disiplin partai yang kuat dan mengikat. Terhadap calon anggota diadakan saringan, sedangkan untuk menjadi anggota pimpinan disyaratkan lulus melalui beberapa tahap percobaan. Untuk memperkuat ikatan batin dan kemurnian ideologi maka dipungut iuran secara teratur dan disebarakan organ-organ partai yang memuat ajaran-ajaran serta keputusan-keputusan yang telah dicapai oleh pimpinan.

Pembagian diatas sering dianggap kurang memuaskan oleh karena dalam setiap partai ada unsur lindungan serta pembagian rezeki disamping pandangan hidup tertentu. Maka dari itu klasifikasi partai yang dikemukakan (Maurice Duverger dalam Miriam Budiardjo 1972 :167-170), yaitu :

1. Sistem Partai Tunggal
Partai tunggal merupakan istilah yang menyangkal diri sendiri (*contardictio in terminis*) sebab menurut pandangan ini suatu sistem selalu mengandung lebih dari satu unsur. Namun demikian istilah ini telah tersebar luas di kalangan masyarakat dan para sarjana. Istilah ini dipakai untuk partai yang benar-benar merupakan satu-satunya partai dalam suatu negara, maupun untuk partai yang mempunyai kedudukan dominan di antara beberapa partai lainnya.
2. Sistem Dwi Partai
Dalam kepustakaan ilmu politik pengertian sistem dwi partai biasanya diartikan adanya dua partai atau adanya beberapa partai tetapi dengan peranan dominan dari dua partai.
3. Sistem Multi Partai
Sistem ini umumnya dianggap bahwa keanekaragaman dalam komposisi masyarakat menjurus ke berkembangnya sistem multi partai. Dimana perbedaan ras, agama atau suku bangsa adalah kuat, golongan-golongan masyarakat lebih cenderung untuk menyalurkan ikatan-ikatan terbatas (*primordial*) tadi dalam satu wajah saja. Dianggap bahwa pola multi partai lebih mencerminkan keanekaragaman budaya dan politik daripada pola dwi partai.

E. Tinjauan Tentang Pemilihan Umum

Salah satu syarat suatu negara yang menganut paham demokrasi adalah adanya sarana untuk menyalurkan aspirasi dan memilih pemimpin negara dengan diadakannya pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan menegakan suatu tatanan politik yang demokratis. Artinya pemilu merupakan mekanisme demokratis untuk melakukan pergantian elit politik atau pembuat kebijakan (Laila, 2004:2). Dari pemilu ini

diharapkan lahirnya lembaga perwakilan dan pemerintahan yang demokratis. Salah satu fungsinya adalah sebagai alat penegak atau penyempurna demokrasi dan bukan sebagai tujuan demokrasi.

Menurut Undang-Undang Pemilu No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan umum bahwa :

“Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia negara yang berdasarkan Pancasila sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Sedangkan menurut Karim dalam Dani (2006:11) Pemilihan umum adalah :

”Sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar memancar kebawah sebagai suatu kewibawaan yang sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat.

Dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum merupakan sarana legitimasi bagi sebuah kekuasaan. Artinya pemilu merupakan roh demokrasi yang benar-benar merupakan sarana pemberian mandat kedaulatan rakyat.

F. Kerangka Pikir

Pemilu merupakan sarana legitimasi bagi penguasa untuk dapat menjalankan pemerintahannya, karena pemilu melibatkan partisipasi masyarakat secara keseluruhan dan segala lapisan masyarakat ikut serta memberikan suaranya, tentunya bagi yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai pemilih. Pemilu bukan hanya bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk dalam lembaga pemerintahan saja, melainkan juga merupakan suatu sarana untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

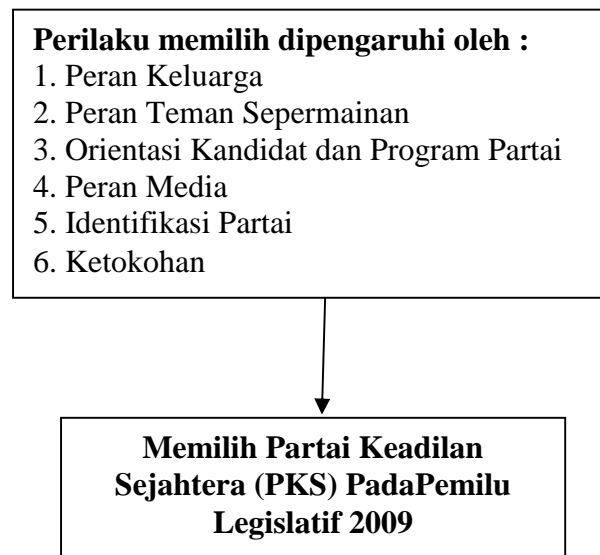
Sebagai perwujudan dari bentuk partisipasi rakyat dan terutama dilaksanakannya prinsip kedaulatan rakyat sangat dibutuhkan sarana artikulasi yang dapat mewadahi dan mewakili partisipasi politik tersebut. Salah satu perwujudan dari bentuk partisipasi politik rakyat adalah melalui pemilu yang merupakan wadah terpenting dalam memenuhi dan keikutsertaan rakyat dalam menentukan arah dan tujuan Negara.

Sebagai sarana partisipasi politik rakyat, pemilihan umum seharusnya mampu berfungsi memberikan pendidikan politik dan meningkatkan kesadaran politik rakyat. Sehingga tercipta kondisi negara yang benar-benar demokratis terutama bagi para pemilih di Kota Metro yang memiliki hak pilih. Mereka harus mampu memanfaatkan hak pilih mereka dalam pemilihan umum dengan sebaik-baiknya. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa banyak indikator yang dapat mempengaruhi mereka sebagai pemilih dalam menentukan pilihannya dalam mendukung atau tidak mendukung Partai Keadilan Sejahtera dalam pemilihan umum legislatif 2009, seperti pengaruh faktor sosiologi yang didalamnya terdapat peran orang tua dan teman-teman sepermainan, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kelompok-kelompok ini mempunyai peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi dan orientasi seseorang.

Kemudian faktor rasionalitas, yaitu apakah mereka memilih karena didukung oleh pengetahuan mereka tentang program partai baik secara langsung maupun melalui media, ataupun kandidat yang akan mereka pilih dan juga adanya pengaruh psikologis dalam diri pemilih. Salah satu konsep psikologis sosial yang digunakan

untuk menjelaskan perilaku untuk memilih pada pemilihan umum berupa identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai tertentu. Faktor psikologis lainnya yang dapat dipertimbangkan adalah ketokohan, yaitu seseorang memilih tidak melihat partai atau kandidat, tetapi melihat tokoh atau pemimpin yang bernaung di atasnya.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis ingin mengetahui bagaimanakah faktor sosiologis, faktor pilihan rasional dan faktor psikologis dengan indikator peran keluarga, teman sepermainan, orientasi kandidat dan program partai, peran media, identifikasi partai dan ketokohan yang selanjutnya akan dijadikan fokus pembahasan dalam penelitian ini mengenai dukungan pemilih terhadap Partai Keadilan Sejahtera Kota Metro pada pemilu legislatif 2009, agar lebih mudah dalam memahami penelitian ini, berikut adalah bagan dari kerangka pikir penelitian ini :



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir